



**MANAJEMEN KRISIS DINAS KESEHATAN PONOROGO DALAM
MENGHADAPI COVID-19 VARIAN BARU OMICRON**

***PONOROGO HEALTH SERVICE CRISIS MANAGEMENT IN FACING COVID-19
NEW OMICRON VARIANT***

**Bambang Setyo Utomo¹, Alfianandra Wafiq pradana², Fandi Avista Baihaqi³, Mohamad
Abiyyu Althof⁴, Agung Wicaksono⁵, Fahmi Ziaulhaq⁶**

¹Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Jl. Raya Siman, Mantren, Patihan Kidul, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Indonesia

^{2,3,4,5,6}Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Jl. Raya Siman, Mantren, Patihan Kidul, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Indonesia

¹Bambang@unida.gontor.ac.id; ²alifianandrawafiqpradana@mhs.unida.gontor.ac.id;

³fandiavistabaihaqi93@gmail.com; ⁴abiyyoe.althoof10@gmail.com;

⁵agungwicaksono@mhs.unida.gontor.ac.id; ⁶ziafahmi09@gmail.com

Diterima tgl. 20 Mei Direvisi tgl. 30 Mei Disetujui tgl. 10 Juni

ABSTRACT

The emergence of a new covid-19 variant (Omicron) has had a real impact in Ponorogo. In an effort to overcome the crisis that occurs, it is necessary to pay special attention and handling to the authorities or the community. The health Office as an institution that is at the forefront in responding to health issues must act quickly before the issue develops into a continuing crisis phenomenon. One of the phenomena of the communication crisis in this pandemic era is the emergence of an excessive concern about the impact of the spread of disease and also the policies made by authorized institutions. Referring to the theory expressed by W. Thompson regarding the 4R (Readiness, Radar, Response, Recovery) in responding to a crisis. The purpose of this study was to determine the crisis management strategy of the Ponorogo Health Service in dealing with the issue of the Omicron Variant Covid-19 crisis. This research is qualitative research with descriptive method. Various data collection processes are carried out both primary and secondary, such as: conducting in-depth interviews with the head of the P2P Health Office, taking documentation of the level of affected patients in Ponorogo. The results of this study indicate that the crisis management carried out by the Ponorogo Health Service in dealing with the new variant of Omicron is in accordance with Thompson's 4R theory stage.

Keywords: Management, Crisis, Health Service, Omicron

ABSTRAK

Munculnya varian covid-19 baru (Omicron) memberikan dampak nyata di Ponorogo. Dalam upaya menanggulangi krisis yang terjadi, perlu adanya penanganan khusus bagi pihak berwajib ataupun masyarakat. Dinas Kesehatan menjadi sebuah institusi yang berada di garda terdepan dalam merespon krisis kesehatan harus bertindak cepat sebelum berkembang menjadi fenomena berlanjut. Salah satu fenomena krisis komunikasi di era pandemi ini adalah timbulnya sebuah kekhawatiran berlebih akan dampak penyebaran penyakit dan juga kebijakan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Merujuk pada teori yang diutarakan oleh W. Thompson mengenai 4R (Readiness, Radar, Response, Recovery) dalam menanggapi sebuah krisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen krisis Dinas Kesehatan Ponorogo dalam menangani krisis Covid-19 Varian Omicron. Penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Proses pengambilan data dilakukan baik primer maupun sekunder, yaitu wawancara mendalam dengan kepala P2P Dinas Kesehatan, pengambilan dokumentasi tingkat angka pasien terdampak di Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen krisis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Ponorogo dalam menghadapi varian baru omicron sesuai dengan tahapan teori 4R milik Thompson.

Kata Kunci: Manajemen, Krisis, Dinkes, Omicron



1. PENDAHULUAN

Kehadiran Virus Covid-19 telah memberikan dampak yang serius di setiap negara. Banyak dampak krisis yang dirasakan mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan terutama dalam bidang sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani beragam varian covid-19 yang telah masuk mulai dari varian Alpha, Beta, dan Delta sebagaimana yang telah dilansir di situs Kementerian Kesehatan pada bulan Mei 2021 (Alya Eka Putri, 2022). Namun Terdapat Laporan kemunculan satu varian baru virus SARS-CoV 2, yang diberi nama varian Omicron (B.1.1.529). Negara yang melaporkan kemunculan awal kasus ini adalah Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021. Setelah diadakan penelitian lanjutan ditemukan bahwasanya hingga 14 Januari 2022 Indonesia telah melaporkan 644 kasus varian omicron yang mana sebagian besar terdiri dari orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri yang berjumlah 529 kasus sedangkan sisanya 115 kasus merupakan transmisi Lokal yang berada di dalam negeri (Menteri Kesehatan, 2022). Dalam tingkat penularan dan perawatan, varian omicron memiliki tingkat penularan yang lebih cepat, sedangkan dalam resiko perawatan di rumah sakit lebih rendah dibandingkan varian Delta (bbc.com, 2022).

Dengan tingginya jumlah korban yang ter dampak varian baru serta daya penularan yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya maka Indonesia membuat penyesuaian kebijakan dalam upaya penanganan atau manajemen krisis yang melanda. Berbagai surat edaran dan peraturan diterapkan oleh pemerintah di setiap daerah mulai dari Kebijakan *Lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mengembalikan kondisi masyarakat kembali normal sedikala. Salah Satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam penanganan varian baru omicron adalah Dinas Kesehatan yang ada di setiap provinsi. Maka diperlukan manajemen yang baik dalam menanggapi suatu krisis dengan cepat dan tepat agar tidak menjadi permasalahan yang besar.

	KASUS AKTIF	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
KOTA SURABAYA	3,202 -103	112,757 -290	106,794 +384	2,761 -9
KAB SIDOARJO	1,583 +115	44,083 -155	41,492 -229	1,008 -2
KOTA MALANG	1,086 +115	27,811 +155	25,549 -206	1,176 -1
KAB BANYUWANGI	789 -33	18,938 -52	16,342 +80	1,807 +5
KAB KEDIRI	775 -47	20,721 -65	18,652 +112	1,294
KAB MALANG	714 -67	24,950 -88	23,246 +153	990 -2
KAB GRESIK	703 -57	20,520 -35	19,069 +92	748
KOTA MADIUN	413 -16	9,756 -46	8,808 -62	535
KAB LUMAJANG	412 -25	10,978 -30	9,561 +54	1,005 -1
KAB JEMBER	382 -8	20,947 -64	19,087 -71	1,478 -1
KAB BANGKALAN	371 +5	7,492 +20	6,374 +15	747
KAB JOMBANG	364 -19	16,241 -54	14,262 +69	1,615 -4
KAB NGANJUK	317 -1	16,148 -36	15,000 -32	831 -3
KAB PONOROGO	310 -7	14,182 -47	12,503 +39	1,369 -1
KAB BOJONEGORO	280 -42	9,387 -27	8,480 +69	627
KAB NGAWI	279 +12	10,042 +53	8,861 +37	902 -4
KAB PASURUAN	255 -35	11,556 -31	10,593 +65	708 -1
KOTA BATU	235 -51	4,818 -10	4,298 +61	285
KAB PROBOLINGGO	216 -19	8,615 -16	7,875 +34	524 -1
KAB MAGETAN	214 -3	12,445 -37	11,235 +40	996

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten masing-masing

CALL CENTER SATGAS COVID-19 PEMPROV JATIM 1500 117 | 04 | @JatimPemprov | Pemprov Jawa Timur

Gambar 1. Update Situasi Jatim 10 Maret 2022 dari Instagram @JatimPemprov



Kasus Covid-19 provinsi Jawa Timur saat ini sedang mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) sehingga para masyarakat dihimbau untuk terus waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki kasus tinggi covid-19 adalah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 tercatat kasus aktif yang berada di Kabupaten Ponorogo berjumlah 310 Kasus. Sedangkan angka kasus positif di kabupaten ini berjumlah 14.135 kasus. Angka kasus positif ini tergolong tinggi yang menempati urutan ke sebelas dibandingkan diantara 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah pasien meninggal 1.368 yang menempati urutan kelima di Jawa Timur. Sedangkan untuk jumlah pasien yang sembuh di Ponorogo berjumlah 12.954 pasien dalam penanganan kasus Covid-19 di Jawa Timur. Salah satu instansi pemerintah yang berupaya dalam penanggulangan penyebaran virus ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Upaya komunikasi yang dilakukan kepada publik harus memiliki tingkat sasaran yang tepat: *Pertama*, Kesadaran dan pengetahuan (Kognitif) publik. *Kedua*, Sikap (Afektif, perasaan, motivasi); *Ketiga*, Kecenderungan perilaku (Konatif), tentang penyakit, ancaman, masalah dan solusi kesehatan (Fadhal, 2020). Dasar dari kebijakan Dinas Kesehatan tentu harus merujuk kepada Protokol Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 (Kantor Staf Presiden, 2020) yang diadopsi dari protokol *World Health Organization* (WHO).

Hingga saat ini Kabupaten Ponorogo menempati urutan PPKM level 2 di wilayah Jawa Timur (Dian Kurniawan, 2022). Dampak dari pembatasan kegiatan yang ada di masyarakat tak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial saja melainkan juga pada aspek psikologis seperti kondisi mental dan kondisi perasaan dan emosi. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Ponorogo menyatakan bahwa 35,64% masyarakat Ponorogo mengaku jenuh dalam situasi krisis ini. Sedangkan dalam kondisi perasaan dan emosi yang masyarakat dinyatakan 29,81% masyarakat sering merasa cemas, 8,16% mudah marah, dan 7,22% mengaku merasa takut bersikap berlebihan (Badan Pusat Statistik, 2021). Berbagai dampak krisis yang dirasakan oleh masyarakat di atas mengungkapkan bahwa covid-19 akan membawa masalah yang berkepanjangan jika tidak terdapat penanganan yang efektif dari Dinas Kesehatan Ponorogo terutama munculnya varian baru omicron.

Adanya krisis yang tumbuh di daerah masyarakat perlu adanya perhatian khusus dari pihak Dinas Kesehatan Ponorogo. Salah satu bentuk gambaran krisis komunikasi di era pandemi ini adalah timbulnya sebuah kekhawatiran berlebih akan dampak penyebaran penyakit dan juga kebijakan yang dibuat. Di dalam bukunya Pinsdorf mengungkapkan dasar dari sebuah komunikasi krisis adalah untuk merespon sesegera mungkin setelah krisis itu terjadi, melalui transparansi informasi dan kejujuran dengan *stakeholders*, baik yang terkena efek langsung atau tidak langsung (Lahar, 2020). Hal ini lah yang sangat penting untuk dikaji.

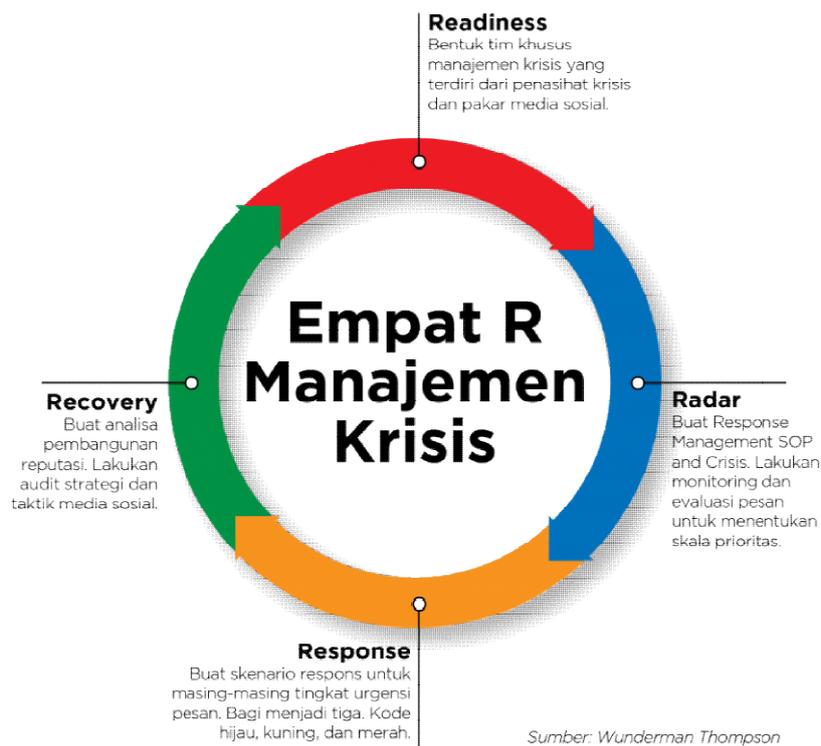
Teori lain yang menjelaskan akan sebuah krisis komunikasi adalah Teori Komunikasi Krisis Situasional. Dimana menurut Coombs ada dua strategi dalam merespons sebuah krisis dalam teori Komunikasi Krisis Situasional, yaitu strategi respon primer dan strategi respon sekunder. Ada tiga pembagian yang masuk dalam strategi respon primer ini, antara lain: menyangkal yang merupakan sebuah upaya agar krisis yang terjadi tidak ada kaitannya dengan sebuah organisasi, pengurangan yakni dengan upaya menurunkan persepsi *stakeholders* bahwa organisasi mempunyai tingkat tanggung jawab yang rendah atau sebaliknya bahwa organisasi sangatlah bertanggung jawab akan hal tersebut, dan terakhir membangun kembali sebuah upaya dalam menciptakan citra positif tentang organisasi tersebut. Sedangkan strategi respon sekunder adalah bentuk penguatan pandangan atau opini terhadap organisasi (Lahar, 2020).





Dalam menciptakan sebuah opini yang baik pun perlu adanya manajemen public relations yang baik di dalam organisasi. Terdapat fungsi manajemen *public relations* dalam menyikapi sebuah krisis, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan dan opini baik dan bermanfaat (Infra Wahdaniah, 2020). Setidaknya ada empat peran utama *public relations*, yaitu sebagai seorang komunikator atau penghubung antara organisasi atau perusahaan dengan publik, membina hubungan positif dan saling menguntungkan, peran *back up management*, dan sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan membentuk corporate image. Terdapat sistem 4R (*Readiness, Radar, Response, Recovery*) menurut Admardatine, CEO Wunderman Thompson sebagai panduan komunikasi krisis (Kartika, 2019).

1. **Readiness**, membentuk tim khusus manajemen krisis yang terdiri dari penasihat krisis dan pakar media sosial.
2. **Radar**, membuat response management SOP and crisis, dengan melakukan monitoring dan evaluasi pesan untuk menentukan skala prioritas.
3. **Response**, membuat skenario respon untuk masing-masing tingkat urgensi pesan, dengan kode pesan: hijau, kuning, dan merah.
4. **Recovery**, membuat analisa pembangunan reputasi dengan melakukan audit strategi dan taktik media sosial.



Gambar 2. Empat R Manajemen Krisis Wunderman Thompson (Kartika, 2019)

Dari keempat hal diatas telah diketahui betapa pentingnya bagi sebuah institusi/ korporasi memiliki sistem manajemen krisis yang terdiri dari panduan komunikasi krisis dan mitigasi krisis. Berawal dari, **Readiness** yaitu dengan mempersiapkan bagaimana sebuah lembaga atau perusahaan menghadapi krisis. Dimulai dengan membentuk tim khusus manajemen krisis yang terdiri dari





penasihat krisis dan pakar media sosial. Spesialisasi penasihat krisis yang dibutuhkan adalah media relations specialist, operations liaison, spokes-person, legal team, dan PR specialist. Sementara spesialisasi tim pakar media sosial meliputi *social strategist*, *social media* atau *community manager*, *social analyst*, *search specialist*, dan *content producer*.

Setelah itu lanjut ke-R yang kedua, **Radar**. Caranya dengan membuat *Response Management SOP and Crisis*. Diawali dengan monitoring dan evaluasi pesan. Monitoring dilakukan dengan cara memantau *tweets*, video, foto, forum, dan *blog posts* terkait perusahaan dan tren yang berhubungan dengan brand. Lalu, evaluasi pesan untuk menentukan skala prioritas. “Ada dua faktor kunci untuk mendeteksi tingkat urgensi pesan. Pertama, relevansi, *tone*, volume, dan kecepatan peredaran pesan. Kedua, seberapa besar pengaruh pihak yang menyampaikan pesan,

Menuju ke langkah ketiga, **Response**. Kriteria scenario respons yang diberikan untuk masing-masing tingkat urgensi pesan harus disusun sejak dini, jangan menunggu krisis itu muncul. Dapat diawali dengan kode hijau sebagai tanda sebuah pesan mengandung bentuk ancaman yang rendah dan diunggah oleh pihak yang tidak berpengaruh. Dapat diatasi dengan monitoring rutin terhadap isu yang berkembang.

Adapun kode kuning sebagai tanda sebuah pesan bernada cukup mengancam dan disampaikan oleh pihak yang berpengaruh. Dapat diselesaikan dengan melakukan monitoring dan klarifikasi resmi di berbagai media sosial dan laman resmi perusahaan/organisasi, serta situs yang relevan. Memperingatkan dan mempersiapkan respon bagi karyawan, stakeholders dan rekanan agar mereka siap jika sewaktu waktu terlibat.

Terakhir bentuk kode merah sebagai tanda bagi sebuah pesan isu bernada sangat mengancam dan menyudutkan, disampaikan oleh individu/organisasi yang sangat berpengaruh. Bila sebuah organisasi/kelompok diterpa hal ini dapat menggunakan cara pengembangan taktik respons mulai dari respons di media sosial, marketing melalui mesin pencari, gandeng media konvensional, unggah informasi rutin di laman resmi perusahaan.

Dan langkah terakhir adalah **Recovery**, Pulihkan reputasi dengan membuat analisa pembangunan reputasi. Lakukan audit strategi dan taktik media sosial. Buat rencana pertumbuhan dan perlindungan reputasi, bangun susunan narasi yang efektif dan strategi konten. Terakhir, aktivasi rencana-rencana tersebut dan segera kembalikan citra lembaga atau perusahaan.

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan dan pendukung dalam penelitian kali ini yaitu penelitian milik Siti Lutfiatul Mardiyah dan Aqida Nuril Salma mengenai Strategi Komunikasi Krisis Humas Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian kali ini yaitu teori penanganan krisis menurut Morissan (2006) yang mengatakan bahwasanya penanganan krisis dilakukan dalam 3 fase yaitu, pertama adalah fase pra-krisis, kedua adalah fase krisis dan yang ketiga adalah fase pasca krisis (Siti Lutfiatul Mardiyah, 2021). Pada fase pra krisis Pemerintah Kabupaten Jember melakukan tindakan penanganan awal sebagai antisipasi terjadinya krisis. Pada fase krisis mengharuskan Pemerintah lebih ekstra dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat. Krisis yang terjadi begitu cepat mengharuskan komunikasi terjalin dengan cepat juga, akurat dan merata agar penanggulangan dapat dilakukan dengan cepat pula. Dan dalam fase pasca krisis pemerintah nantinya harus mengevaluasi semua komitmen dan kebijakan pada saat krisis sehingga menjadi pembelajaran untuk masa yang akan datang dan lebih siap lagi dalam menghadapi krisis yang terjadi.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui strategi manajemen krisis Covid-19 Dinas Kesehatan Ponorogo dalam penanggulangan varian baru Omicron.





Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait bagaimana manajemen krisis yang baik yang bisa digunakan dalam menghadapi krisis lainnya. Adapun bagi Dinas Kesehatan Ponorogo dapat memberikan saran dan masukan untuk terus meningkatkan kemampuan para sumber daya manusia yang ada di dalam instansi. Adanya sebuah krisis akan menjadi pengalaman baru dan pembelajaran yang sangat efektif agar tidak terus terulangi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat memberikan deskripsi gambaran mengenai strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Ponorogo dalam menangani pandemi Covid-19 terutama varian baru Omicron yang terjadi di Ponorogo. Alasan penggunaan penelitian kualitatif ialah untuk mendeskripsikan fenomena sedalam-dalamnya di Dinas Kesehatan Ponorogo terkait strategi manajemen krisis yang dilakukan melalui pengumpulan data yang dalam juga (Kriyantono, 2006). Untuk sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*Depth Interview*) dengan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Ponorogo Ibu Meitha sebagai *key Informan*. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka melalui beberapa buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber bacaan lain yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan ialah dengan observasi dan dokumentasi. Observasi dan wawancara sering dipadukan guna mencapai keberhasilan yang lebih mantap dan menyelami jiwa, perasaan, dan rambu-rambu perilaku informan (Kriyantono, 2006).

Tempat penelitian kali ini bertempat di Dinas Kesehatan Ponorogo Kantor Terpadu dengan lama waktu penelitian selama tiga pekan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan pengumpulan data-data di lapangan. Setelah data terkumpul, maka data tersebut di kelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Dalam penelitian ini juga digunakan triangulasi data (Mutiawati, 2018). Menurut Miles dan Hubberman terdapat tiga proses kegiatan dalam menganalisa sebuah data yaitu reduksi, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan (Rijali, 2019). Reduksi data merupakan kegiatan menyederhanakan dan menggolongkan data-data yang masih kasar menjadi beberapa kategori tertentu yang lebih sederhana agar mudah dipahami. Penyajian data ialah tahapan kegiatan setelah reduksi data yaitu menjadikan data sebagai sebuah kumpulan informasi yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Terakhir ialah penarikan kesimpulan akan mudah dilakukan jika kedua tahapan sebelumnya terlaksana dengan baik. Kegiatan ini bisa diverifikasi dengan memikirkan ulang penulisan, melihat dan memastikan kembali data lapangan, meninjau kembali dengan mengajak teman sejawat untuk memberikan ide gagasan atau bertukar pikiran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Virus Covid-19 varian baru Omicron telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia, memaksa para pemerintah untuk merevisi strategi nasional masing-masing dalam menghadapi pandemi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *technical brief* oleh *World Health Organization (WHO)* bahwa varian Omicron telah terbukti jauh lebih cepat tingkat penularannya dibandingkan varian





Delta. Meskipun tingkat penyebaran yang sangat cepat, namun tingkat bahaya perawatan pasien lebih rendah dibandingkan dengan varian lainnya. (Chairani, 2022) disertai peningkatan kemampuannya menghindari vaksin dan menyebabkan infeksi ulang. Hal ini dibuktikan ketika jumlah pasien yang terinfeksi mengalami pelonjakan, namun peningkatan rawat inap akibat penularan Omicron tidak terlalu dramatis. Terdapat bukti lain saat mereka telah disuntik dengan dosis ganda atau telah menerima booster lebih kecil kemungkinannya untuk dirawat di rumah sakit atau meninggal jika terkena varian ini.

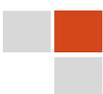
Dalam mencegah penyebaran virus ini, Dinas Kesehatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak memberikan kebutuhan informasi, maupun berupa pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Terlihat bahwa Dinas Kesehatan hadir guna memfasilitasi kebutuhan sesuai pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi khusus Dinas Kesehatan ialah sebagai dinas teknis yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan hakikat otonomi dan membantu melaksanakan tugas teknis operasional yang meliputi pengembangan dan pembinaan pelayanan kesehatan berupa pencegahan, pemberantasan penyakit menular, maupun pembinaan program kesehatan lingkungan.

Dinas Kesehatan Ponorogo mempunyai peran dalam menghimbau masyarakat guna memutus rantai penyebaran dan perkembangan virus penyakit. Oleh karena itu dibutuhkan strategi manajemen komunikasi yang baik dan terencana sehingga tidak mengakibatkan kepanikan dan ketidakpercayaan masyarakat yang berada di Ponorogo. Adanya komunikasi yang dilakukan pada saat terjadi peningkatan krisis sangatlah berguna untuk mencegah atau meminimalisir dampak yang dirasakan oleh instansi daerah tertentu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Ponorogo dibantu oleh Puskesmas, Labkesda, Akper maupun Depo Farmasi dan Alat-alat kesehatan. Walaupun memang, saat ini informasi terkait varian Omicron masih sangat terbatas. Para ahli masih terus mengumpulkan data untuk memperbarui informasi yang dapat dibagikan kepada masyarakat umum, khususnya terkait perkembangan virus ini dalam hal penularan dan tingkat bahaya penyakit yang ditimbulkannya.

Proses manajemen komunikasi yang telah terlaksana di Dinkes Ponorogo yaitu dengan melakukan langkah 3T yaitu *Testing, Tracing, Treatment*. Pendekatan ini dirancang dengan mengidentifikasi kasus Covid-19 dengan pengecekan kesehatan melalui beberapa jenis tes untuk deteksi terkonfirmasi Covid-19, lalu menelusuri orang-orang yang menghabiskan waktu dan berhubungan dekat dengan mereka dan mungkin terinfeksi, kemudian pendekatan untuk mengisolasi diri, sehingga jika terinfeksi dapat dicegah penularannya kepada orang lain (Rajan et al., 2020)

T yang pertama ialah dengan bersedia melakukan *Testing* atau pengecekan kesehatan. *Testing* adalah pemeriksaan dini untuk dapat mengetahui kondisi seseorang sudah terjangkit Covid-19 atau tidak. Hal ini sangat penting agar tindakan lebih lanjut atau perawatan dapat diterima/dilakukan dengan cepat. Dengan *testing*, potensi penularan dapat diperkecil. Umumnya, ada tiga jenis tes Covid-19 yang sering digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau tidak, di antaranya tes antigen (Swab Antigen), tes molekuler (Swab RNA/PCR), dan tes hembusan nafas (Tes Genose). Setiap jenis tes memiliki tingkat keakuratan yang berbedabeda untuk mendeteksi infeksi Covid-19

Kedua yaitu membuka diri terhadap proses *tracing* atau penelusuran kontak kasus positif, *Tracing* merupakan proses mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang telah berkontak langsung dengan pasien positif Covid-19. Ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19. Yang terakhir ialah *treatment* yaitu dengan menjalani perawatan dengan benar apabila merasakan gejala





covid-19. Perawatan yang dilakukan ada 2 cara yaitu isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan petugas puskesmas bagi yang positif tanpa gejala.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19. Dalam penerapannya, langkah 3T juga dibarengi dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Satgas Covid-19, 2021). Kebijakan tersebut diberlakukan dalam rangka upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 supaya tidak semakin meluas dan mengakibatkan pemaparan yang lebih banyak lagi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo telah melakukan tahapan proses manajemen komunikasi berdasarkan sistem 4R dalam tahapan krisis milik Wunderman Thompson yaitu *readiness, radar, response, dan recovery*. Tahapan pertama yaitu **Readliness** yang dilakukan dengan membentuk sebuah tim khusus dalam penanganan sebuah krisis covid-19 yang sedang dihadapi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pada tahapan ini diketahui bahwa Dinas Kesehatan Ponorogo tidak memiliki tim khusus untuk menangani kasus covid-19, melainkan semua bidang ikut terlibat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing. Adapun bidang-bidang yang menangani covid-19 di Dinas Kesehatan Ponorogo ialah Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2P) yang bertugas dalam kekarantinaan pasien, kewaspadaan dini, serta segala respon penanggulangan. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) yang bertugas memenuhi kebutuhan logistic seperti peralatan APD dan obat-obatan Bidang pelayanan kesehatan (Yankes) yang bertugas merawat pasien, pengontrolan pasien isolasi mandiri, jaminan keperawatan, bidang kesekretariatan yang mengurus dalam hal administratif seperti data-data yang terjangkit covid-19.

Terkait tim penasihat krisis covid-19 di Dinkes Ponorogo belum terbentuk. Meski begitu Dinas Kesehatan Ponorogo mendapatkan nasehat dan arahan langsung dari Kementerian Kesehatan Pusat. Sehingga seluruh Standar Operasional Pelaksanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Ponorogo sudah standar nasional Sebagaimana amanah yang telah tertulis dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik agar instansi pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tujuan mempermudah dalam pencarian data informasi. Dengan adanya Undang-Undang ini Dinas Kesehatan Ponorogo juga telah membentuk tim pakar media PPID sebagai pengelola segala data yang ada di Instagram dan web institusi.

Adapun akun Instagram yang digunakan ialah @dinkes.png dilengkapi dengan alamat Web di dalamnya yaitu <https://dinkes.ponorogo.go.id/>. Segala informasi fasilitas yang bisa diakses dari akun ini yaitu layanan informasi keadaan terkini mengenai status Covid-19 terutama jadwal vaksinasi rutin, layanan publik yang dilengkapi dengan kotak saran pengaduan yang disediakan oleh Dinkes terdiri dari. Terlihat dari postingan yang ada selama masa pandemi bahwa akun resmi Instagram milik Dinas Kesehatan Ponorogo dipenuhi dengan berita dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan situasi perkembangan covid-19.





Gambar 3. Jadwal vaksinasi pada akun resmi Dinas Kesehatan Ponorogo ([instagram.com/dinkes.png](https://www.instagram.com/dinkes.png))

Pada tahapan R selanjutnya yaitu *Radat*, Dinkes Ponorogo membuat respons management SOP dan krisis yang dilakukan dengan menentukan skala prioritas. Hal pertama kali yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menganalisis tingginya kenaikan kasus pada Covid varian Omicron di Ponorogo, apa saja penyebab dari kenaikan kasus, berapa banyaknya pasien yang terpapar virus Covid varian Omicron, pendataan kesiapan alat kesehatan dari Dinkes Ponorogo, dan kesiapan tenaga medis untuk menangani kasus baru ini, semua komponen ini yang kemudian dikumpulkan dan dipadukan sehingga menjadi informasi yang penting dalam menentukan skala prioritas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mengacu kepada satu SOP. SOP merupakan suatu landasan dasar dalam melakukan segala tindakan (Arnina, 2016). SOP memiliki banyak fungsi, diantaranya memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja (Prayudi, 2016). Untuk standar pelaksanaan operasional penanganan pasien Covid, Dinas Kesehatan Ponorogo menggunakan standar pelaksanaan yang tertera di dalam Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 23 Tahun 2021 sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh menteri Kesehatan RI kepada seluruh Dinas Kesehatan Wilayah.

Ibu Meitha selaku Ketua Bidang P2P Dinas Kesehatan Ponorogo menjelaskan bahwa contoh dari penerapan SOP tersebut adalah jika ada warga Ponorogo yang baru kembali dari luar negeri maka harus di tes PCR terlebih dahulu di bandara kedatangan dan jika terindikasi positif maka harus melakukan karantina selama 10 hari di bandara, kemudian jika sudah dilakukan, selanjutnya



dilakukan tes PCR lagi di kampung halaman, dan jika terindikasi positif maka harus karantina mandiri di rumah selama 10 hari. Hal ini diterapkan kepada seluruh warga Ponorogo tanpa terkecuali.

Adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Ponorogo dalam mensosialisasikan informasi-informasi terkait virus Covid ini yaitu melalui media sosial resmi milik Dinas Kesehatan seperti Instagram (*dinkes.png*), selain itu juga mensosialisasikannya melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar setiap masyarakat di berbagai daerah di Ponorogo dapat memperoleh informasi terkait virus ini melalui OPD masing-masing. Ibu Meitha juga mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Ponorogo sendiri belum pernah mengadakan acara penyuluhan khusus terkait virus Covid Omicron kepada masyarakat secara langsung, namun di setiap kegiatan/acara selalu disisipkan informasi-informasi tentang covid dan anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan.

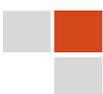
Lanjut menuju tahapan R selanjutnya yaitu **Response**, tahapan ini memiliki peran yang krusial/penting di dalam sistem 4R ini. Sebuah institusi atau korporasi harus dapat menganalisa dan memberikan sebuah antisipasi terkait tingkat urgensi pesan yang diterima. Menjadi kesalahan besar bilamana institusi menunggu sebuah pesan berkembang menjadi isu krisis yang mengancam. (Lahar, 2020)

Bertolak pada munculnya varian baru *Omicron* di Indonesia, Dinas Kesehatan Ponorogo mengklarifikasi seluruh pesan yang diterima, sebelum pesan tersebut menjadi sebuah ancaman munculnya krisis baru. Dalam tahap ini, dengan membuat sebuah skenario untuk masing-masing tingkat urgensi pesan. Skenario pertama dapat diartikan sebagai skenario tertinggi yang disebut sebagai Siaga Satu.

Dan perlu di garis bawahi setiap skenario terbagi menjadi beberapa macam jenis, ada berupa skenario *intern* ataupun skenario *ekstern*. Untuk skenario intern atau ke dalam adalah segala bentuk upaya Manajemen Dinas Kesehatan Ponorogo serta dukungan terhadap antisipasi perkembangan isu terkait. Seperti Individu, Rumah Sakit, hingga penanganan sosial *distancing*. Adapun penanganan *ekstern* (keluar), Dinas Kesehatan telah menyiapkan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, hingga media ataupun aplikasi penunjang yang memudahkan masyarakat dalam merespon informasi yang diberikan (Infra Wahdaniah, 2020).

Di Dinas Kesehatan Ponorogo sendiri telah terdapat sebuah layanan yang dapat mempermudah masyarakat untuk berkonsultasi, seperti *Public Service Commission* (PSC) dan Layanan jipri dokter. PSC sendiri merupakan bentuk layanan cepat tanggap dalam kondisi darurat kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan segera. Dengan adanya PSC ini, dapat menangkap dan merespon informasi kejadian kegawatdaruratan, melakukan bentuk penanganan pertama di lokasi kejadian hingga menyediakan mobilitas/transportasi medis. Adapun *response* yang diberikan Dinas Kesehatan pada skenario ini, bila menemukan sebuah isu bernada mengancam dan diunggah oleh pihak yang berpengaruh dapat diberikan sebuah toleransi, dan kami juga memberikan sebuah edukasi ataupun klarifikasi baik melalui *pers conference* ataupun sebuah konten.

Menuju skenario kedua adalah skenario menengah yang disebut dengan Siaga Dua. Pada skenario ini tidak seluruh sumber daya dikeluarkan dalam menghadapi sebuah isu, melihat pada tingkat urgensi pesan yang tidak terlalu memberikan sebuah ancaman dan dilakukan oleh pihak yang tidak begitu berpengaruh. Kemudian pada skenario ketiga yaitu tahap pasca krisis, pada skenario ini Dinas Kesehatan Ponorogo dapat mengelola seluruh sumber daya seperti biasa dengan menerapkan sistem protokol kesehatan yang lebih *intens*, dan dapat dilakukan penyuluhan atau bentuk vaksinasi massal guna memulihkan keadaan pasca krisis.





Tahapan terakhir ialah *Recovery*, yaitu tahap pemulihan setelah terjadinya krisis dengan pemulihan reputasi. Pada skenario tahap ini, Dinas Kesehatan Ponorogo untuk memulihkan keadaan daerah atau menuju ke *new normal*, mereka mempunyai kebijakan hukum dan program-program untuk menanggulangi krisis covid-19. Kebijakan dari Dinkes yang pertama yaitu menekankan program kesehatan (prokes) sendiri dengan hukuman ringan seperti denda bagi pelanggar. Selanjutnya jika covid-19 ini meningkat maka mereka melakukan PPKM ber-level seperti halnya yang sudah dilakukan pada bulan Juli 2021 tahun lalu.

Pengukuran tingkat pemahaman dalam keadaan krisis terdiri dari pengetahuan mengenai pengertian covid-19 terutama varian baru, gejala penyakit yang muncul, apa faktor resiko yang bisa dirasakan, hingga tingkat bahaya yang ditimbulkan. Dengan penyebaran pesan-pesan ini maka masyarakat dapat menghadapi masa krisis dengan tindakan yang tepat sesuai arahan Dinkes Ponorogo (Angendari, 2021). Selain itu, Dinkes Ponorogo juga mempunyai beberapa event untuk berusaha membantu mengurangi tingkat kenaikan krisis covid-19, salah satunya adalah mengadakan senam bersama di berbagai penjuru daerah Ponorogo yang dilakukan minimal seminggu sekali yaitu pada hari Minggu pagi. Selanjutnya yaitu mengadakan vaksinasi bersama di setiap daerah secara bergilir, dengan mempunyai target masyarakat yang sudah di vaksin sebesar 70% lebih dan yang di dahulukan adalah lansia, karena umur lansia yang rawan terkena virus covid-19.

Untuk menekan laju penyebaran varian baru omicron di Ponorogo maka Dinas Kesehatan juga turut meningkatkan pelayanan dengan cara percepatan vaksinasi lanjutan terutama booster sebagai tahap *recovery*. Seperti yang dipaparkan oleh Wakil Bupati Ponorogo Bunda Lisdyarita yang mengatakan bahwa akselerasi vaksinasi booster ini sangat berguna dalam peningkatan imunitas serta kekebalan tubuh dalam menghadapi varian baru omicron. Dari data terbaru yang didapatkan bahwa capaian vaksinasi di Ponorogo untuk dosis pertama telah mencapai 85%, dosis kedua 75%, dan booster 57% (PROKOPIM, 2022).

Kemudian Dinas Kesehatan juga sudah menyiapkan tempat bagi masyarakat yang sudah terkena virus untuk isolasi di ESKADE Ponorogo dengan fasilitas 24 bed, dan tambahan tempat di RSUD dengan 74 bed. Dengan harapan pasien yang terjangkit virus cepat pulih dan virus tidak menyebar kemana-mana.

Semua program Dinas Kesehatan Ponorogo akan berjalan dengan lancar, kalau semua masyarakat Ponorogo sadar dan mendukung semua program yang telah dibuat. Tapi yang menjadi hambatan program dari Dinkes adalah kesadaran masyarakat yang rendah tentang bahayanya virus ini dan pentingnya program yang telah dibuat, dan hambatan yang paling berpengaruh pada program adalah di aspek sosial seperti halnya ekonomi dan lainnya.

Pada hakikatnya segala respon dan umpan balik yang dikirimkan antara Dinas Kesehatan Ponorogo dan masyarakat termasuk dalam bentuk komunikasi yang bersifat dua arah. Dengan segenap perencanaan komunikasi yang dilakukan dalam menangani krisis dilakukan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan darurat. Dengan adanya dampak kerugian yang telah dipaparkan seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan psikologi tiap individu masyarakat Ponorogo dapat berkurang dengan baik dan efektif (Ferdiana & Hidayati, 2022).

Pihak manajemen institusi yang baik ialah yang siap terhadap berbagai kemungkinan yang datang memberikan dampak dan tantangan untuk meningkatkan citra dan reputasi. Dengan adanya Krisis Covid-19 yang meningkat dan berkembang menjadi varian Omicron menjadi titik balik (*turning point*) bagi Dinas Kesehatan Ponorogo untuk bangkit, berkembang, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi (Prayudi, 2016). Sebagaimana yang dikatakan Janine L. Ried (2000) dalam pengantar bukunya bahwa tidak ada satupun institusi organisasi atau perusahaan





yang tidak mengalami sebuah krisis. Artinya ketika Institusi sedang dalam fase baik dan stabil, maka harus menetapkan beberapa rencana darurat yang bisa digunakan dalam menanggulangi fenomena krisis yang datang secara tiba-tiba.

Oleh karena itu, perlu diingat siapapun bisa terserang varian Omicron, tidak peduli tua ataupun muda bahkan bagi mereka yang sudah di vaksin sekalipun. Oleh karena itu Dinkes Ponorogo selalu memberikan pesan yang bersifat mempersuasi melalui media sosial dan juga OPD untuk jangan lengah untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Pesan lain bersifat edukatif yang mencakup penerapan protokol kesehatan yang harus tetap dipatuhi guna melindungi diri sendiri dan orang lain. Segala penerapan recovery yang ada pada masa *new normal* harus selalu didukung mulai dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, hingga menghindari makan bersama dengan orang yang berstatus positif covid-19. Semuanya akan sangat membantu mencegah penularan COVID-19 yang masih terus membayangi kehidupan kita.

4. PENUTUP

Untuk menahan laju penyebaran covid-19, maka setiap divisi yang berada dalam Dinas Kesehatan Ponorogo bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo telah melakukan tahapan-tahapan dalam manajemen krisis covid-19 terutama varian baru omicron. Tahapan tersebut ialah 4R manajemen krisis milik Wunderman Thompson. Tahapan Pertama Yaitu *Readliness* dengan membentuk tim pakar media sosial yaitu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Tahapan kedua Radar yaitu dengan membuat respons management SOP yang mengacu kepada Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 serta mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kenaikan kasus varian omicron di Ponorogo. Tahapan ketiga adalah Response menganalisa tingkat urgensi pesan yang diterima dengan membaginya kepada skenario tertinggi yaitu siaga satu, skenario kedua (menengah) yaitu siaga dua, dan skenario terakhir yaitu tahap pasca krisis. Tahapan R terakhir ialah Recovery yaitu dengan melakukan pembangunan reputasi dan pemulihan keadaan dengan suatu event acara senam bersama dan vaksinasi massal.

Dengan Munculnya varian baru omicron covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo mengupayakan 3T yaitu Testing, Tracing, Treatment yaitu dengan bersedia melakukan pengecekan kesehatan melalui rapid test dan swab jika diperlukan. T yang kedua dengan mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang telah berkontak dengan pasien positif Covid-19. Upaya terakhir ialah treatment yaitu dengan menjalani perawatan dengan benar apabila merasakan gejala covid-19. Guna mendukung segala upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Ponorogo maka setiap lini masyarakat harus turut berpartisipasi dengan mendukung semua program yang telah dicanangkan terutama dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Semua hal ini dilakukan agar setiap individu terlindungi sehingga segenap kegiatan baru (*new normal*) yang ada di Kota Ponorogo berjalan dengan baik dan kondusif.

Maka berdasarkan hasil ulasan manajemen krisis Dinas Kesehatan Ponorogo diatas, peneliti merekomendasikan hal yang berkaitan dengan *Readliness* yang mengacu kepada teori tahapan krisis 4R milik Thompson yaitu dengan membentuk tim khusus yang berupa penasehat krisis agar segala program yang akan dan telah direncanakan dapat ter evaluasi dengan baik. Dengan adanya tim pakar yang ahli dalam menasehati dibidang krisis pandemi, maka akan sangat baik dalam mengontrol segala tahapan manajemen krisis yang akan dilakukan.





Ucapan Terimakasih

Ribuan rasa terimakasih dan kesyukuran dari segala pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian kali ini. Ucapan terimakasih terutama kepada Dinas Kesehatan Ponorogo terutama Bu Mietha yang telah menerima kami untuk melakukan penelitian di dalam Instansi tersebut sehingga kami bisa belajar dan menambah wawasan kami dalam penanganan krisis covid-19.

Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman yang turut berjuang membantu dalam pelaksanaan penelitian terutama dosen pembimbing lapangan yang telah rela mengorbankan waktunya guna mengarahkan dan membimbing kami dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Rustandy, T. (2006). Tekan Korupsi Bangun Bangsa. Retrieved January 14, 2007, from <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyd=1291>
- Alya Eka Putri, S. (2022). *Varian-varian Covid-19, Apa Perbedaannya?* Corona.Jakarta.Go.Id. <https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/varian-varian-covid-19-apa-perbedaannya>
- Angendari, D. A. D. (2021). Menelaah Pesan Pemerintah Terkait Krisis Covid-19 di Media Sosial. *Jurnal Riset Komunikasi*, 4(2), 247–260. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v4i2.327>
- Arnina. (2016). *Langkah-Langkah Efektif Menyusun SOP Standard Operating Procedures*. Huta Media.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Perilaku Masyarakat Kabupaten Pati pada Masa PPKM Darurat. *Bps Ri*, 3502, 45. <https://www.bps.go.id/publication/2021/08/02/29234b08faa4910dee5279af/perilaku-masyarakat-pada-masa-ppkm-darurat--hasil-survei-perilaku-masyarakat--pada-masa-pandemi-covid-19--periode-13-20-juli-2021.html>
- bbc.com. (2022). *Covid Omicron menyebar cepat, berapa lama pengidapnya bisa menularkan virus ke orang lain?* Bbc.Com.
- Chairani, T. (2022). *PENULARAN OMICRON LEBIH CEPAT DARI VIRUS DELTA, KADINKES: TETAP WASPADA DAN DISPLIN PROKES*. Tanjungpinangkota.Go.Id.
- Dian Kurniawan. (2022). *Surabaya dan 21 Daerah di Jatim PPKM Level 3, Khofifah Minta Perketat Prokes*. <https://Surabaya.Liputan6.Com/>. <https://surabaya.liputan6.com/read/4894772/surabaya-dan-21-daerah-di-jatim-ppkm-level-3-khofifah-minta-perketat-prokes>
- Fadhal, S. (2020). Komunikasi publik di tengah krisis: tinjauan komunikasi pemerintah dalam tanggap darurat pandemi covid-19. *Media, Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19*, 1–25. <https://eprints.uai.ac.id/1469/>
- Ferdiana, & Hidayati, Y. (2022). Komunikasi Krisis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka pada Pemberitaan Efek Samping Vaksin COVID-19. *Jurnal Riset Komunikasi*, 5, 16–31.
- Infra Wahdaniah, U. W. (2020). Strategi manajemen krisis. *Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(3), 228–236.
- Kartika, R. (2019, November). Pentingnya Memiliki Panduan Krisis. *PR Indonesia*.
- Kriyantono, R. (2006). *TEKNIK PRAKTIS RISET KOMUNIKASI Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Adversting, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran (Pertama)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Lahar, L. (2020). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 553–566.





- Menteri Kesehatan, I. (2022). *SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/18/2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KASUS COVID-19 VARIAN OMICRON (B.1.1.529)*. <https://tumj.tums.ac.ir/article-1-11063-fa.html>
- Mutiawati, I. (2018). *Dakwah di Media Sosial (Studi Fenomenologi Dakwah di Instagram)* (Vol. 2, Issue 3) [Islam Negeri Walisongo]. <http://eprints.walisongo.ac.id/9496/1/SKRIPSI LENGKAP.pdf>
- Prayudi. (2016). *Manajemen Isu & Krisis*. CV Mitra Printing.
- PROKOPIM. (2022). *Menko Marves Dorong Percepatan Vaksinasi Booster, Bunda Lisdyarita : Vaksinasi Lanjut, Terutama Booster*. Prokopim.Ponorogo.Go.Id.
- Rajan, D., Koch, K., Rohrer, K., Bajnoczki, C., Socha, A., Voss, M., Nicod, M., Ridde, V., & Koonin, J. (2020). Governance of the Covid-19 response: A call for more inclusive and transparent decision-making. *BMJ Global Health*, 5(5), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002655>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Satgas Covid-19. (2021). Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten Buku 2. In T. A. B. P. P. S. T. P. COVID-19 (Ed.), *Satuan Tugas Penanganan Covid-19* (Vol. 53, Issue 9). Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- Siti Lutfiatul Mardiyah, A. N. S. (2021). Strategi Komunikasi Krisis Humas Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penanganan. *E-Proceeding of Management*, 8(5), 7624–7635.

